

EFEKTIVITAS KOMUNIKASI POLITIK ERMA SURYANI RANIK (ANGGOTA DPD ASAL KALIMANTAN BARAT) DENGAN MASYARAKAT PERBATASAN DESA SEBUNGA KECAMATAN SAJIGAN BESAR

Fitriyasa

Abstract

This research describing how political communication effectiveness been maintained between members DPD RI origin West Kalimantan and local communities border. Political communication that develops between the two not widely held in official. But it is not seen in border West Kalimantan namely village Sebunga West Kalimantan. DPD RI as an institution regional representatives should have a place communication between DPD members and a constituent at each region. It is embodied in public consultation forum border area that in cooperation LSM Perhimpunan PENA an NGO local as an escort the forum. Communication that lasts imaged in public consultation forum border areas. Communication effectiveness Erma Suryani Ranik can be assessed of credibility communicator, structure messages, media, society and reaction that is in communication process political.

Keyword : The effectiveness of political communication, DPD RI members West Kalimantan, the community border.

A. PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 keempat pada tahun 2002 telah menjadi awal perubahan ketatanegaraan Indonesia dari unikameral menjadi bikameral dalam sistem perwakilan di legislatif, ditandai dengan berdirinya lembaga baru di parlemen yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Wewenang DPD RI yang terbatas dalam legislasi karena hanya bisa merekomendasikan perundangan bukan memutuskan, hal ini mempengaruhi sistem perwakilan Indonesia. Sistem bikameral akhirnya menjadi semu karena adanya keterbatasan dalam legislasi, sehingga tidak berimbangnnya kewenangan antara DPD dan DPR serta belum terwujudnya *check and balances* di dalam parlemen. Gagasan untuk mewujudkan sistem dua kamar untuk mengakomodasikan kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan belum terealisasi dengan baik.

Keterbatasan bidang yang ditangani DPD serta kewenangan yang terbatas ditingkat legislasi membuat banyak pihak menilai adanya kepincangan dalam sistem perwakilan bikameral. Oleh karena itu keberadaan DPD menjadi gamang karena adanya ketidaktegasan peran dan fungsi dalam konstitusi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang DPD juga merupakan salah satu faktor tidak optimalnya peran dan fungsi DPD RI. Masyarakat masih bingung tentang tugas dan fungsi DPD RI.

Partai politik memiliki peran yang penting dan begitu besar dalam berdemokrasi. Parpol dianggap sebagai lembaga politik formal yang berfungsi mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan konstituen. Fungsi parpol yang tidak ada dalam DPD RI berdampak pada pelaksanaan agregasi kepentingan rakyat. Keberadaan DPD menjadi ambigu, seperti ada dan tiada, di parlemen bersama DPR tetapi tidak ada hak legislasi yang kuat. Ini memberikan gambaran tentang bentuk konstitusi yang tidak jelas, bikameral, trikameral atau unikameral. Bila dilihat dari substansi sejatinya akhirnya sistem menjadi unikameral, karena hak-hak legislasi DPR begitu maksimal di parlemen.

Salah satu tugas DPD adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat daerah untuk selanjutnya dibawa ke pusat sebagai perancangan kebijakan dipusat. Hal ini dilakukan oleh semua anggota DPD di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali DPD asal

Kalimantan Barat, hal-hal seperti penjangkaran aspirasi merupakan salah satu bentuk membangun komunikasi dengan masyarakat daerah. Membangun komunikasi dengan masyarakat daerah seperti yang dilakukan oleh anggota salah satu anggota DPD asal Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik. Menarik untuk diamati karena komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPD RI asal Kalimantan Barat dengan metode komunikasi dialogis melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan di daerah perbatasan berkerjasama dengan LSM Perhimpunan Pena dan TIFA. Daerah perbatasan merupakan wilayah yang jarang diadakan forum yang mempertemukan masyarakat dengan wakil rakyat daerah. Tujuannya untuk membangun komunikasi langsung antara DPD RI dengan masyarakat perbatasan. Forum konsultasi publik untuk membangun komunikasi antara masyarakat perbatasan dan anggota DPD RI asal Kalimantan Barat.

Komunikasi politik anggota DPD dan masyarakat perbatasan berdampak pada kebijakan yang akan diambil oleh DPD dalam pengambilan di tingkat pusat. Pembangunan daerah perbatasan haruslah menguasai kepentingan dan aspirasi masyarakat dari daerah itu sendiri. Sehingga inti demokrasi bisa berjalan dengan efektif karena rakyat daerah lebih didengar. Manifestasi komunikasi politik antara anggota DPD RI asal Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan adalah forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi yang efektif.

Efektivitas komunikasi politik merupakan tujuan dalam forum konsultasi publik tersebut. Efektivitas komunikasi politik dapat terwujud tujuan dari komunikasi politik tersebut berhasil. Tujuan dari komunikasi politik sebagai wadah pendidikan politik kepada masyarakat perbatasan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas komunikasi politik antara masyarakat daerah perbatasan dengan Erma Suryani Ranik sebagai anggota DPD RI periode Tahun 2009-2014. Hal ini bisa dilihat dari sejauh masyarakat menilai tentang komunikasi yang terjalin dengan anggota DPD RI asal Kalimantan Barat.

A.1 Metode Penelitian

Tipe penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur atau proses lebih mengedepankan makna daripada generalisasi. Metoda analitis deskriptif di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di daerah perbatasan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai komunikasi politik anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yaitu Erma Suryani Ranik dan faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan komunikasi politik tersebut.

A.2 Hasil Penelitian

Efektivitas komunikasi politik adalah adanya komponen komunikasi politik yang efektif sehingga adanya perubahan perilaku politik masyarakat daerah perbatasan kepada anggota DPD RI yaitu Erma Suryani Rani dalam forum konsultasi publik daerah perbatasan. Ada 5 komponen utama agar terbangunnya efektivitas komunikasi politik yaitu sebagai adalah komunikator politik (Anggota DPD RI), pesan, media, masyarakat, dan reaksi.

B. PEMBAHASAN

B.1 Komunikator

B.1.1. Kemampuan merespon masyarakat

Keahlian yang menyangkut pengetahuan dan kepercayaan kejujuran merupakan indikator dalam menilai kredibilitas komunikator politik. Kredibilitas komunikator dapat diukur dari pendapat para partisipan yaitu masyarakat

perbatasan Desa Sebunga. Kredibilitas komunikator Erma Suryani Ranik bisa digambarkan dari hasil wawancara dengan Alex, 45 Tahun salah satu warga Desa Sebunga, Dusun Aru di rumah Bapak Kepala Desa, Yosef Nampe pada tanggal 27 Mei 2014 :

“Ibu Erma keliatan pintar karena beliau bisa menjelaskan tentang peran dan fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan dengan baik. Pengetahuan beliau tentang perbatasan juga sangat banyak. Jadi kami disini merasa sangat senang bisa bertemu dan berdialog dengan Ibu Erma. Ibu Erma juga bercerita tentang DPD yang mempunyai kuasa yang terbatas dalam memperjuangkan masalah perbatasan di pusat.”

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Alex tentang kredibilitas Erma Suryani Ranik, sebagai komunikator politik. Dari pendapat tersebut bisa merangkum tentang pengakuan inteletualitas yang cukup sebagai komunikator politik. Kredibilitas komunikator tidak dilihat dari satu sisi saja, penulis tidak hanya melihat dari sudut pandang satu informan saja, tetapi juga melihat dari berbagai sudut pandang. Kredibilitas komunikator bisa tergambar dari wawancara penulis dengan Kepala Dusun Aruk Bapak Kristorus, yang ditemui pada 27 Mei 2014 di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, berikut ini :

“Kami di desa ini tidak minta banyak kepada pemerintah. Pendapat kami di dengar dan didatangi oleh pejabat saja kami sudah senang. Kami tahu pejabat juga mempunyai banyak tanggung jawab dan tugas. Kami di sini penduduk Desa melihat Erma Suryani Ranik merupakan pejabat yang bisa dipercaya terhadap apa yang beliau utarakan di dalam forum tersebut. Warga desa kami mempunyai berbagai tuntutan kepada pemerintah, tapi kalo untuk melawan kami tidak. Karena kami masih percaya terhadap perjuangan untuk pembangunan kami di pusat melalui mereka.”

Pendapat dari Kepala Dusun Aruk terhadap Erma dan pemerintah daerah memberikan dukungan yang baik kepada Erma dan pemerintah. Ini merupakan hal yang baik, kepercayaan terhadap anggota DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang membangun legitimasi di masyarakat daerah perbatasan.

Selain kedua orang tersebut penulis juga mewancarai Kepala Desa Sebunga, Yosef Nampe, yang juga terlibat di dalam forum konsultasi publik daerah perbatasan, wawancara dilakukan di rumahnya pada 27 Mei 2014 pada pukul 11.00 WIB :

“Kami berdialog dengan Ibu Erma waktu itu, kami menyampaikan masalah yang kami hadapi di perbatasan. Ibu erma menjawab dengan lancar sehingga saya percaya beliau itu orang pintar dan dapat dipercaya. Beberapa hal yang kami sampaikan waktu itu mengenai permasalahan hak mendirikan kebun kepala sawit, ibu Erma menanggapi dengan dukungan untuk segera mengusut mengenai permasalahan tersebut.”

Dari wawancara di atas dapat memberikan penilaian terhadap bentuk berkomunikasi Erma Suryani Ranik yang memberikan penilaian Kepala Desa Sebunga terhadap kredibilitas komunikator. Kredibilitas komunikator sudah diakui oleh Kepala Desa dengan adanya kepercayaan bahwa Erma Suryani Ranik merupakan anggota DPD RI yang pintar dan dapat dipercaya.

Kredibilitas komunikator politik bisa dinilai dari kepercayaan masyarakat tentang kepantasan seorang komunikator memegang sebuah jabatan ataupun tugas negara. Salah satu bentuk kepercayaan dan keberpihakan itu penulis melihat dari salah satu guru di Desa Sebunga yaitu Yauma Yulida, 25 Tahun tentang pendapat beliau tentang kredibilitas komunikator yaitu Erma Suryani Ranik, yang ditemui di Kabupaten Sambas pada 23 Mei 2014 pukul 21.00 WIB, sebagai berikut :

“Saya tidak pernah meragukan kredibilitas Erma Suryani Ranik sebagai anggota DPD RI yang kredibel. Karena latar belakang beliau yang memang seorang wartawan dan penulis di surat kabar lokal dapat memberikan kepercayaan terhadap pengetahuan beliau tentang permasalahan perbatasan. Beliau juga mempunyai bahasa yang sederhana dalam percakapan langsung. Ibu Erma seperti sosok yang *sangat low profile* dalam kesehariannya dan jauh dari kesan mewah tetapi lebih ke kesan *smart nya*.”

Penjelasan dari Yauma Yulida menggamabarkan bahwa Erma Suryani Ranik merupakan sosok yang mempunyai kredibilitas yang baik. Kredibilitas bisa dilihat dari sumber pengetahuan beliau yang merupakan seorang wartawan dan jurnalis sehingga pengetahuan tentang perbatasan dan kemampuan intelektualitasnya tidak perlu diragukan.

B.1.2. Daya Tarik Fisik dan Non Fisik

Daya tarik fisik dan non fisik adalah citra yang ditangkap oleh masyarakat Desa Sebunga terhadap komunikator yaitu Erma Suryani Ranik. Daya tarik fisik dan non fisik ini bisa dinilai dari penampilan fisik yaitu gaya bicara, sifat pribadi dan keterampilan dan berkomunikasi dengan masyarakat Desa Sebunga. Sedangkan fisik bisa dilihat dari tampan atau cantik, cara berbusana, dan hangat. Hal ini tergambar dari wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebunga, Bapak Yosef Nampe, berikut ini :

“Ibu Erma merupakan salah satu anggota DPD yang beberapa kali pernah datang ke Desa Sebunga. Beliau datang untuk memantau langsung keadaan di daerah perbatasan. Ibu Erma ramah, dan mudah berbincang dengan warga Desa Sebunga, beliau pun sempat menginap di Desa kami dan tidak segan ngobrol dengan kami. Kita merasa sudah akrab dengan beliau dan mudah untuk mengutarakan apa saja yang kami ingin sampaikan. Dari segi penampilan beliau cukup sederhana dan rapi.”

Daya tarik yang ditangkap oleh Bapak Yosef Nampe terhadap Ibu Erma Suryani Ranik dilihat dari dua sisi yaitu fisik dan non fisik. Kesederhanaan tergambar dalam berpenampilan tetapi tetap hangat dalam bersikap. Penilaian Bapak Yosef Nampe tentang daya tarik fisik dan non fisik juga disampaikan oleh Bapak D.O Srikujam selaku panitia pelaksana sekaligus koordinatot forum konsultasi publik daerah perbatasan.

Wawancara dengan Bapak D.O Srikujam dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di Kantor Perkumupulan PENA di Pontianak, hasil wawancara mengenai daya tarik fisik dan non fisik adalah sebagai berikut :

“Ibu Erma itu sangat egaliter sehingga ia sangat mudah bergaul dengan masyarakat perbatasan. pengalaman beliau yang seorang peneliti juga sehingga

sudah biasa bekerja di lapangan bersama masyarakat. Ibu Erma juga merupakan salah satu yang memperhatikan tentang permasalahan perbatasan. Ibu Erma orangnya sederhana dalam sikap dan berpakaian sehingga masyarakat perbatasan juga mudah simpati dengan beliau.”

Daya tarik fisik dan Non fisik juga diungkapkan oleh Yauma Yulida sebagai guru di daerah Kabupaten Sambas tentang Daya tarik fisik dan non fisik Erma Suryani Ranik. Hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“Ibu Erma merupakan sosok yang cerdas, latar belakang ibu Erma yang merupakan wartawan merupakan salah satu alasan mengapa tuturan kata beliau mudah dipahami oleh masyarakat perbatasan, orang lapangan seperti Ibu Erma mudah bergaul dan berbaur dengan masyarakat. Ibu Erma merupakan salah satu perempuan yang kaya prestasi dan pengalaman sehingga tidak sulit bagi saya untuk percaya pada beliau untuk dapat memperjuangkan masalah-masalah perbatasan sendiri. Ibu Erma orangnya sangat enak diajak ngobrol, orangnya terbuka tidak terlalu banyak protokoler tetapi lebih kenyamanan dalam berdialog.”

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat tergambar tentang daya tarik fisik dan nonfisik komunikator, yaitu Erma Suryani Ranik dari segi penampilan dalam berbusana dan bersikap dengan masyarakat di perbatasan.

B.3.3 Kesamaan

Kesamaan dinilai dari persamaan harapan dan kebutuhan, harapan dan perasaan yang ditimbulkan oleh komunikator terhadap partisipan komunikator yaitu masyarakat perbatasan. Hal ini bisa dinilai dari hasil wawancara dengan masyarakat perbatasan berikut ini yaitu Kepala Desa Sebunga, Bapak Yosef Nampe :

“Ibu Erma mendukung tentang pembangunan perbatasan, masalah perbatasan merupakan masalah yang paling laku dijual dipusat. Tetapi sayang perjuangan beliau untuk pembangunan dan perkembangan masih terganjal di DPD karena wewenangnya masih terbatas di pusat. Saya percaya Ibu Erma merupakan salah satu anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yang memperhatikan permasalahan perbatasan.”

Hasil wawancara tersebut dapat menggambarkan bagaimana informan merasa didukung adanya rasa puas dari wawancara tersebut. Bapak Nampe memperlihatkan bahwa adanya kepercayaan terhadap komunikator untuk memperjuangkan nasib perbatasan di pusat walaupun akhirnya wewenang DPD tidak bisa memperjuangkan masalah perbatasan di pusat dengan maksimal. Dijelaskan oleh Bapak Nampe bahwa DPD mempunyai wewenang yang terbatas mengenai permasalahan perbatasan.

Hal senada di sampaikan oleh Bapak Kristorus selaku Kepala Dusun Aruk Desa Sebunga mengenai Kesamaan komunikator politik. Pendapat Bapak Kristorus tentang kesamaan komunikator yang dirasakan sebagai berikut :

“Saya percaya ibu Erma itu memperjuangkan masalah kami disini, ibu Erma sudah datang kesini dan berdialog saja dengan kami sudah memberikan saya kepercayaan dan dukungan terhadap Ibu Erma selaku Anggota DPD. Ibu Erma mendukung setiap aspirasi kami tentang masalah disini.”

Kesamaan harapan dan kebutuhan antara komunikator dan partisipan komunikator di dalam forum konsultasi publik sudah memiliki keselarasan. Terpenting adanya pendapat yang baik terhadap Erma Suryani Ranik selaku anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yang mempunyai mandat untuk mewakili daerah di pusat.

B.2 Struktur pesan-pesan yang disampaikan di dalam forum konsultasi publik daerah perbatasan

B.2.1 Menumbuhkan Perhatian Masyarakat Desa Sebunga

Perhatian masyarakat perbatasan Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator, Erma Suryani Ranik yang bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak D.O Srikujam yang merupakan koordinator dan panitia pelaksana forum konsultasi publik perbatasan :

“Masyarakat perbatasan sangat senang dan antusias dalam menerima Ibu Erma Suryani Ranik, karena memang acara seperti konsultasi publik ini sangat jarang dilaksanakan. Pembukaan forum konsultasi publik dibuka oleh panitia dan dilanjutkan oleh kata sambutan dari Ibu Erma Suryani. Ibu Erma menjelaskan tentang diri beliau dan tugas dan fungsi DPD serta perkenalan tentang jabatan beliau di komite IV yang menangani tentang masalah anggaran pusat dan daerah. Dialog yang terjadi antara masyarakat perbatasan dan Ibu Erma Suryani Ranik cukup santai tetapi tetap berjalan kondusif karena metode tatap muka langsung sehingga perhatian masyarakat Desa Sebunga sudah cukup diperlihatkan dari antusiasme dari masyarakat daerah perbatasan Desa Sebunga untuk berpartisipasi dalam forum konsultasi publik tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang membawa proposal mengenai berbagai macam permasalahan di desa mereka. Mereka sangat berharap kedatangan Ibu Erma bisa menyelesaikan permasalahan mereka di desa.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa sudah menumbuhkan perhatian masyarakat karena adanya antusiasme dari masyarakat daerah mendukung forum konsultasi publik. Perhatian masyarakat dapat terlihat dari partisipasi masyarakat dan antusiasme masyarakat dalam berdialog dengan Erma Suryani Ranik di forum konsultasi publik. Hasil wawancara Kepala Desa Yusef Nampe bisa menggambarkan bagaimana perhatian masyarakat.

“Kami masyarakat disini sangat senang dengan kedatangan Ibu Erma yang sudah jauh-jauh datang dari Ibu Kota ke daerah perbatasan yang begitu jauh ini. Kami sangat menghargai sehingga masyarakat memang sudah kami gerakan untuk berpartisipasi dalam forum konsultasi publik tersebut. Terbukti banyak dari kami membawa proposal dan ikut berdialog dengan Ibu Erma mengenai permasalahan yang kami hadapi di sini. Juga karena tidak tiap hari pejabat negara datang ke sini mbak.”

Dari jawaban Bapak Nampe soal perhatian masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat di datangi saja sudah sangat senang, mereka sangat berharap anggota bisa memberikan perubahan dan solusi untuk permasalahan desa. Bertatap langsung dan berdialog sangat efektif dalam menumbuhkan perhatian dan partisipasi masyarakat. Karena disini peranan individu sangat ditonjolkan dalam forum konsultasi publik.

B.2.2 Bahasa yang digunakan dapat dimengerti secara jelas oleh masyarakat perbatasan

Bahasa yang digunakan komunikator sangat mempengaruhi proses penyampaian pesan kepada partisipan komunikator atau masyarakat daerah perbatasan. Bahasa yang efektif akan menimbulkan pengertian dari partisipan komunikator tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Berikut penjelasan dari hasil wawancara Yauma Yulida tentang bahasa yang digunakan :

“Ibu Erma itu bahasanya sederhana, beliau menggunakan bahasa Indonesia biasa tetapi dialek daerah pada saat percakapan masih terasa saat berbincang dengan Ibu Erma. Bahasanya sederhana dan gaya bahasa beliau yang cenderung blak-blakan tanpa membuat intimidasi karena beliau anggota DPD tetapi cenderung merangsang masyarakat untuk berfikir dan berbuat semakin banyak lagi untuk kemajuan daerahnya.”

Bahasa Indonesia sehingga semua bisa mengerti secara jelas apa saja yang disampaikan Erma Suryani Ranik di dalam forum konsultasi publik. Maupun di luar forum konsultasi publik, mengenai bahasa yang digunakan bisa tergambar dari wawancara penulis dengan Kepala Desa Sebunga. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Yosef Nampe adalah sebagai berikut :

“Bahasa yang digunakan Ibu Erma sudah cukup dimengerti, karena kita bertemu langsung dan berdialog mudah bagi kami memahami yang beliau sampaikan. Beliau juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi DPD, tetapi wewenangnya terbatas. Kami gampang memahami beliau karena bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari tidak begitu formal. Karena mungkin beliau mengerti bahwa sebagian besar masyarakat hanya berpendidikan sampai SMP sehingga bahasa yang digunakan tidak begitu formal.”

Komunikator dapat menempatkan diri dengan baik, karena bahasa yang digunakan disesuaikan dengan masyarakat daerah perbatasan yang sebagian besar masih berpendidikan SMP. Bahasa yang digunakan oleh komunikator juga dijelaskan oleh Bapak D.O Srikujam, sebagai berikut :

“Bahasa yang digunakan oleh anggota DPD Kalimantan Barat yang datang sepertinya memahami tentang permasalahan perbatasan, gaya berbicara dan menjelaskan sudah bisa dipahami secara jelas. Saya mengenal Ibu Erma cukup lama bahkan sebelum ia menjadi anggota dewan, latar belakang sebagai wartawan dan penulis di harian lokal tidak sulit untuk beliau memilah bahasa yang digunakan dalam forum konsultasi publik. Permasalahan di daerah perbatasan macam-macam tapi Ibu Erma selalu menjawab dan mencoba berdialog untuk memberikan pemahaman dan usaha-usaha untuk tindak lanjut permasalahan tersebut.

Gaya bahasa beliau cenderung santai, mungkin dikarenakan beliau merupakan orang lapangan sehingga penduduk cepat merasa akrab dengan beliau, bahkan beliau tidak segan untuk menginap di rumah warga. Tidak semua pejabat negara mau melakukan hal tersebut.”

Bahasa merupakan salah satu indikator tentang kredibilitas komunikator politik. Pemahaman berbanding lurus dengan pengalaman dari komunikator tersebut. Hal ini mempengaruhi cara pandang di masyarakat daerah perbatasan.

Kredibilitas itu bisa dilihat dari cara-cara berbahasa dan memaparkan masalah serta menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat perbatasan.

Masalah bahasa merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas komunikasi politik. Bahasa yang digunakan menggambarkan bagaimana diri seorang komunikator politik. Citra bisa timbul dari bahasa yang digunakan oleh komunikator politik. Bila dilihat dari wawancara tersebut citra yang ditangkap oleh panitia pelaksana adalah citra tentang sosok yang santai dalam berbahasa tapi tetap memberikan gambaran intelektualitas yang memadai dari anggota DPD tersebut.

B.2.3 Cara menyampaikan kalimat konkret, detail, dan spesifik disertai bukti untuk mendukung opini

Salah satu indikator dalam efektifitas pesan yang disampaikan adalah menyampaikan kalimat yang baik. Cara menyampaikan kalimat bisa diperlihatkan dari hasil wawancara penulis dengan Yauma Yulida, tentang cara menyampaikan kalimat oleh komunikator politik sebagai berikut :

“Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ibu Erma sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh para masyarakat. Beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang diajukan oleh masyarakat dengan singkat dan mendorong agar masyarakat bisa paham tentang permasalahan yang dialami oleh pemerintah dan DPD sendiri untuk persoalan perbatasan itu sendiri.”

B.3. Media/Saluran tatap muka dengan komunikasi dialogis

B.3.1. Adanya intensitas komunikasi

Forum konsultasi publik merupakan tempat bertemunya masyarakat daerah perbatasan dengan wakil dari daerah mereka di parlemen yaitu anggota DPD RI asal Kalimantan Barat. Tujuannya agar masyarakat perbatasan diberikan wadah untuk berkomunikasi secara dialogis bersama anggota DPD RI asal Kalimantan Barat. Adanya intensitas komunikasi antara anggota DPD dan masyarakat perbatasan bisa tergambar dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebunga berikut ini :

“forum konsultasi publik hanya dilakukan sekali dan tidak dilanjutkan hingga sekarang. Pertemuan langsung dengan wakil masyarakat desa Sebunga hanya dari no handphone yang ditinggalkan oleh Erma Suryani Ranik apabila ada permasalahan di desa kami yang ingin dikonsultasikan kepada beliau. Kami mengerti perjalanan dari Pontianak ke perbatasan sangat jauh tidak bisa ditempuh dalam 1 atau 2 jam, tetapi bisa 10 jam dari Ibu Kota Provinsi. Sehingga sudah adanya beliau disini berdialog dan mendengarkan aspirasi kami disini membuat kami merasa didengarkan pendapat masyarakat disini. Saya tahu masalah perbatasan ini memang paling laku dijual di pusat. Karena menyangkut berbagai kepentingan baik daerah atau pusat.”

Intensitas komunikasi yang tidak berjalan dengan kontinuitas sehingga ada akses yang terputus dalam komunikasi tersebut. Komunikasi menjadi kurang efektif karena dalam waktu sesingkat itu ingin menampung seluruh aspirasi masyarakat Desa Sebunga.

Kontinuitas dalam membangun komunikasi sangat penting, hal ini merupakan salah satu penunjang komunikasi yang efektif. Komunikasi yang dijalankan dengan kontinuitas akan membangun empati diantara komunikator politik dan konstituennya.

B.3.2. Emotional Bounding

Sentuhan emosional agar anggota DPD RI agar lebih diterima oleh masyarakat di sebuah Desa dengan tetap berkomunikasi dengan para penduduk Desa Sebunga seperti makan bersama dan melakukan interaksi diluar forum resmi.

Masyarakat perbatasan yang masih tradisional sehingga pendekatan secara emosional sangat diperlukan dalam membangun komunikasi. Walaupun terbilang sangat singkat waktu dalam membangun komunikasi kepada masyarakat perbatasan secara langsung. Dalam pertemuan-pertemuan informal terkadang banyak hal-hal baru yang terungkap dari hasil diskusi dengan warga desa Sebunga. Orientasi ide-ide politik seharusnya berangkat dari grassroot karena memang permasalahan dan solusi juga berada di level tersebut. Walaupun mungkin pendidikan di desa Sebunga belum bisa dikatakan layak tetapi itu adalah cermin dari keadaan masyarakat perbatasan itu sendiri. Dalam menjaring aspirasi masyarakat harus dapat membaca potensi-potensi yang ada di masyarakat.

B.3.3. Personal Branding

Personal branding seorang anggota legislator seperti anggota DPD RI Erma Suryani Ranik merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan terhadap personal dan lembaga DPD RI itu sendiri. Penjelasan tentang hal ini dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Kristorus, Kepala Dusun Aruk, Desa Segunga sebagai berikut :

“Ibu Erma datang dan serta menginap di desa kami serta berdialog dan bermusyawarah dengan para anggota masyarakat disini. Beliau memang sangat ramah dan terbuka dengan kami sehingga kami merasa nyaman berkomunikasi dengan beliau. Kami merasa wakil daerah benar-benar memperjuangkan nasib kami di perbatasan. Ibu Erma juga sangat santai dan hangat sehingga kami mudah ngobrol dengan beliau. Kami mengerti banyak yang diurus oleh para wakil rakyat tetapi kami sudah diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi kami sudah merasa puas.

Kesan egaliter dari Erma Suryani Ranik terlihat dari pendapat Bapak Kristorus sebagai Kepala Dusun Aruk Desa Sebunga. Erma Suryani Ranik menggambarkan citra yang hangat sehingga suasana akrab dan intim sudah terbangun di dalam forum konsultasi publik daerah perbatasan.

B.4 Konstituen / Masyarakat Perbatasan

B.4.1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Sebunga untuk memberikan kontribusi kepada forum konsultasi publik di daerah mereka cukup baik. Beberapa tokoh masyarakat diikutsertakan sehingga masyarakat mudah untuk ikut serta ke dalam forum konsultasi publik tersebut. Perhatian, pengertian dan penerimaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas saluran komunikasi politik dengan metode komunikasi dialogis. Tentang hal ini terlihat dari beberapa pendapat masyarakat tentang perhatian, pengertian dan penerimaan. Salah satunya adalah pendapat dari Bapak D.O Srikujam selaku panitia pelaksana forum konsultasi publik daerah perbatasan :

“Perhatian dapat dilihat dari partisipasi mereka untuk memberikan aspirasi serta masukan kepada anggota DPD RI Erma Suryani Ranik yang diwakili oleh beberapa anggota masyarakat mulai dari perempuan, tokoh adat dan

masyarakat umum. Pengertian tentang tugas, peran dan fungsi DPD dapat dijelaskan oleh para anggota masyarakat yang mengikuti forum konsultasi publik. Walaupun mereka akhirnya kecewa dan adanya yang sedikit emosi dikarenakan merasa adanya ketidakadilan dalam memberikan wewenang pada lembaga DPD. Melalui anggota DPD RI asal Kalimantan Barat mereka berharap semua aspirasi mereka dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan UU. Ibu Erma juga sangat mudah akrab dan berbaur dengan gaya yang sederhana dan apa adanya masyarakat bisa merasa dekat dengan beliau. Saya mengenal beliau bahkan sebelum menjadi anggota DPD sehingga memang kepedulia beliau dan kredibilitas beliau dalam memperjuangkan kepentingan daerah sangat tinggi. Banyak dokumentasi beliau saat mengkritik pemerintah daerah mengenai permasalahan perbatasan ataupun masalah daerah yang lain.”

Dari pendapat D.O Srikujam di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian, pengertian dan penerimaan kepada Erma Suryani Ranik sudah dirasakan masyarakat. Ini penting sebagai bentuk mengoptimalkan legitimasi anggota DPD di masyarakat dengan adanya kepercayaan dan pengertian masyarakat tentang kedudukan DPD dipusat. Wawancara lain adalah dari Bapak Nampe selaku Kepala Desa Sebunga sebagai berikut :

“Kami disini warga masyarakat senang dan menyambut baik dengan kedatangan Ibu Erma Suryani Ranik selaku anggota DPD asal Kalimantan Barat, beliau dapat merangkul masyarakat untuk percaya DPD sedang memperjuangkan kepentingan daerah kami. Walaupun ternyata kewenangan DPD seperti yang dijelaskan beliau tidak maksimal di pusat. Saya percaya DPD RI juga berjuang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat perbatasan tetapi mungkin kewenangan yang masih sangat terbatas di pusat membuat mereka tidak maksimal memperjuangkan masalah-masalah perbatasan. Jawaban-jawaban Ibu Erma terhadap permasalahan yang kami alami disini memberikan jawaban yang dapat diterima, ia sudah memiliki alasan-alasan yang rasional.”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sebunga, Bapak Yosef Nampe memperlihatkan dukungan yang positif terhadap Ermas Suryani Ranik. Perhatian dengan penjelasan yang dikemukakan dan penjelasan mengenai peran dan fungsi DPD yang terbatas sudah dapat dijelaskan dengan baik. Pengetahuan tentang DPD dapat memperlihatkan sudah terciptanya perhatian, pengertian dan penerimaan terhadap pesan-pesan yang disampaikan dan komunikator sendiri yaitu Erma Suryani Ranik.

B.5. Reaksi

B.5.1 Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap komunikasi yang berlangsung dengan anggota DPD RI sebagai bagian dari parlemen di Indonesia. Dampak adalah akibat dari proses komunikasi politik yang sudah berjalan di daerah perbatasan. Dampak tersebut bisa dilihat dari pengetahuan, sikap serta pendapat masyarakat mengenai citra yang ditangkap dari komunikator yaitu Erma Suryani Ranik di forum konsultasi publik. Dampak komunikasi politik bisa tergambar dalam wawancara dengan Bapak Yosef Nampe Kepala Desa Sebunga, sebagai berikut :

“Mulai dari masalah-masalah yang kami hadapi hingga wewenang DPD dipusat yang sangat minim, hanya bisa ngajuin atau menyarankan kebijakan khususnya

disini masalah anggaran. Kami kemarin sempat membawa proposal, ternyata DPD tidak ada wewenang untuk memutuskan anggaran, seharusnya diberikan wewenang lebih seperti DPR. Jadi saya simpulkan DPD itu sangat lemah wewenangnya, padahal perbatasan ini sangat mudah dijual di pusat. Saya setuju apabila DPD RI diberikan wewenang dalam anggaran agar kami bisa lebih mudah dalam memberikan kontribusi untuk perbatasan.”

Dampak dari komunikasi politik adalah membentuk citra, dukungan serta partisipasi masyarakat dalam politik serta pengetahuan tentang tugas dan fungsi DPD RI. Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Kristorus mengenai peran dan fungsi DPD RI sebagai berikut :

“Saya tidak begitu mengerti secara jelas apa saja tugas dan fungsi DPD, tetapi yang saya tahu proposal yang kami ajukan pada saat forum konsultasi publik tidak dapat ditindaklanjuti karena DPD tidak ada hak untuk itu. Saya berharap DPD diberikan wewenang yang lebih mengenai hal tersebut. Kami disini hanya menuntut kebutuhan kami tetapi tidak akan memberontak kami masih percaya DPD merupakan lembaga yang bisa memberikan kontribusi yang baik untuk permasalahan kami disini.”

Pengetahuan Bapak Kristorus mengenai tugas dan fungsi DPD terbatas sehingga tidak bisa menindaklanjuti proposal yang dibawa oleh para masyarakat perbatasan. Tetapi hal ini tidak berdampak negatif terhadap pendapat Bapak Kristorus untuk mendukung DPD agar bisa memperjuangkan permasalahan daerah, khususnya daerah perbatasan bisa diperjuangkan oleh Ibu Erma Suryani Ranik melalui DPD. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi DPD juga dikemukakan oleh Bapak D.O. Srikujam sebagai berikut :

“DPD itu seharusnya bisa mengubah sistem ketatanegaraan menjadi bikameral tetapi sayang kewenangan sangat terbatas hanya bisa mengusulkan tidak memutuskan UU. Sehingga bisa dikatakan bahwa bikameral di Indonesia itu bikameral banci karena akhirnya porsi untuk memutuskan UU hanya diberikan oleh DPR. seharusnya DPD diberi wewenang dalam memutuskan kalau hanya bisa mengusulkan itu terlalu lemah. Kalau saya setuju apabila DPD itu dibubarkan saja kalau memang tidak bisa diberi porsi yang lebih besar dari sekarang, Tapi saya lebih berharap bila tugas dan fungsi DPD dapat diperkuat melalui konstitusi yaitu amandemen UUD yang kelima.”

Dari hasil wawancara mengenai dampak proses komunikasi politik tersebut, dapat memberikan kekecewaan dan dukungan terhadap DPD RI. Kecewa karena wewenang sangat terbatas di parlemen tetapi mendukung untuk memperkuat DPD karena keseimbangan diperlukan di dalam parlemen. DPD sudah seharusnya diberikan hak untuk memutuskan sebuah RUU untuk disahkan sebagai UU. Karena keseimbangan di dalam parlemen pada saat ini tidak terjadi karena hanya DPR yang mempunyai hak untuk memutuskan suatu RUU menjadi UU di parlemen.

Dukungan terhadap DPD sebagai lembaga yang dapat memperjuangkan hak-hak daerah serta memperjuangkannya dipusat. Hal ini juga tercermin dalam wawancara dengan guru dari Kabupaten Sambas, Yauma Yulida, sebagai berikut :

“Sayang sekali ternyata wewenang DPD dipusat sangat terbatas padahal kita memerlukan wakil daerah yang bisa memperjuangkan kepentingan daerah agar RUU dapat sesuai dengan kepentingan daerah. Tetapi saya kurang setuju

apabila DPD diberikan wewenang untuk memutuskan apakah itu juga tidak bisa menggantikan negara Indonesia yang kesatuan menjadi seperti sistem distrik apabila wewenang DPD diperkuat. Tapi saya menilai DPD sudah bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugasnya di daerah, melalui forum konsultasi di perbatasan ini.”

Dampak komunikasi politik menurut informan adalah memberikan pengertian terhadap wewenang DPD dipusat dan memberikan argumentasi dalam menilai soal memperkuat DPD melalui amandemen kelima UUD.

B.6 Faktor-faktor yang menghambat Komunikasi Politik Erma Suryani Ranik DPD RI asal Kalimantan Barat dengan Masyarakat Daerah Sebunga

B.6.1 Internal

Desa Sebunga merupakan salah satu daerah perbatasan di Kalimantan Barat yang dikunjungi Erma Suryani Ranik dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat daerah perbatasan. Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas menempuh perjalanan ditempuh dari Kota Pontianak ke lokasi sekitar 10 jam dengan menggunakan mobil. Lama perjalanan sebenarnya bukan hanya dikarenakan jarak ke lokasi tetapi kondisi jalan menuju kesana masih tidak mendukung, sehingga cukup menghambat perjalanan menuju ke Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan besar. Kondisi jalan saat memasuki Desa Sebunga ke Biawak Malaysia sangat mulus beraspal berbeda dengan perjalanan dari Sambas menuju desa sebunga. Dapat disimpulkan dari Desa Sebunga yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tepatnya Biawak, Sarawak Malaysia, memiliki akses jalan yang lebih baik dari Desa tersebut ke Malayasia.

Border yang dibangun pada tahun 2010 merupakan prestasi gemilang yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dan pusat. Border antara Indonesia-Malaysia ini belum diresmikan secara resmi oleh Presiden sehingga sebenarnya akses masuknya masyarakat dari Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya masih illegal. Jarak tempuh yang jauh ke perbatasan mengakibatkan tidak bisa berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat di Desa Sebunga. Seharusnya bisa melaksanakan forum konsultasi publik tersebut beberapa kali sehingga aspirasi masyarakat yang bisa ditampung lebih banyak lagi.

Menurut Ketua dari LSM Perkumpulan PENA yang merupakan tim pelaksana dari forum konsultasi publik daerah perbatasan ini, ditemui di Kantor Perkumpulan penapada tanggal 25 April 2014 mengatakan bahwa :

“forum tersebut tidak berlanjut lagi dikarenakan dana yang tidak memungkinkan untuk meneruskan forum konsultasi publik tersebut. Beliau menambahkan bahwa kewenangan kelembagaan DPD yang masih lemah dalam legislasi yaitu hanya dapat menyampaikan rancangan perundangan juga merupakan salah satu faktor pendukung mengapa forum tersebut belum bisa diadakan kembali. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan pada tahun 2011 tetapi penelitian tentang perbatasan sudah dilaksanakan sejak 2010 oleh LSM Perkumpulan penabekerjasama dengan TIFA.”

Walaupun masyarakat daerah perbatasan sangat menyambut baik forum konsultasi publik yang telah diselenggarakan. Bisa dilihat dari partisipasi masyarakat serta kesanggupan masyarakat untuk menjabarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka melalui forum tersebut. Dialog yang tatap muka yang dilaksanakan oleh masyarakat perbatasan dan Anggota DPD RI asal Kalimantan Barat merupakan

sebuah langkah yang efektif untuk mengenali dan membaca dengan lebih baik untuk merumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan.

Masalah-masalah yang diajukan oleh masyarakat perbatasan Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan salah satu lokasi dari 5 lokasi forum konsultasi publik tersebut. Kebanyakan kegiatan komunikasi politik yang dilaksanakan oleh para anggota legislatif berbentuk monolog bukan dialog seperti yang dilaksanakan oleh forum konsultasi publik. Sebelum diselenggarakan forum tersebut masyarakat Desa Sebunga telah mengadakan kelompok diskusi yang dipandu oleh panitia penyelenggara forum konsultasi publik daerah perbatasan yaitu LSM Perkumpulan PENA. Dengan adanya kelompok diskusi yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Sebunga ini dapat memberikan menyimpulkan masalah-masalah sentral yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan daerah Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar.

Efektivitas komunikasi politik Erma Suryani Ranik Anggota DPD untuk bertemu langsung dan berdialog dengan masyarakat perbatasan dalam sebuah forum konsultasi publik merupakan langkah yang baik dalam memberikan ruang atau wadah masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berdialog langsung dengan wakil mereka di pusat yaitu DPD. DPD yang mempunyai mandat sebagai wakil daerah dipusat dituntut untuk secara aktif membaca dan menyimpulkan permasalahan-permasalahan serta isu daerah yang harus diperhatikan dan dibenahi. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat seperti LSM Perkumpulan penadan TIFA sebagai pendukung dalam proses komunikasi politik Erma Suryani Ranik di perbatasan. Sebelum menjadi anggota DPD RI asal Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik juga merupakan Ketua di LSM Perkumpulan PENA sehingga hal ini merupakan hal yang kuat dalam membangun kredibilitas dan akuntabilitas seorang anggota DPD RI dengan konstituennya di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya daerah perbatasan.

Adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga di masyarakat serta pemerintah daerah merupakan salah satu usaha Erma Suryani Ranik dalam mewujudkan komunikasi politik yang efektif antara DPD dan stakeholder yang ada di daerah, seperti pemerintah daerah dan DPRD. Forum konsultasi publik ini seharusnya memang menjadi agenda resmi anggota DPD sehingga dana yang ada memang berasal dari lembaga DPD sendiri.

Analisis efektivitas komunikasi politik anggota DPD RI asal Kalimantan Barat belum bisa dikatakan efektif. Dilihat dari intensitas kunjungan kerja ke perbatasan khususnya di perbatasan. Terbatasnya kewenangan DPD RI menjadi alasan lembaga ini kurang banyak diberikan porsi dalam berbagai kegiatan di daerah.

Kinerja DPD bila dilihat dari komunikasi politik adalah dengan melihat bagaimana tujuan dari komunikasi politik itu sendiri. Interaksi dengan DPD dalam berbagai media di masyarakat perbatasan sangat diharapkan. Intensitas pertemuan walaupun bukan satu-satunya indikasi efektifnya komunikasi politik. Efektivitas komunikasi politik bisa dilihat dari personal seorang anggota DPD RI dalam membawa peran serta Anggota DPD RI dalam mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan oleh anggota DPD RI.

B.6.2 Eksternal

Sistem demokrasi yang masih prosedural serta wewenang DPD RI di dalam UUD sebagai legislator yang belum tegas membatasi kewenangan antara DPR dan DPD sehingga posisi DPD tidak diuntungkan. Keadaan ini mengakibatkan ketidakefektifan kekuatan DPD RI di parlemen karena terbatas hanya mengusulkan,

dan mengawasi RUU tetapi tidak bisa menolak atau menyetujui Undang-Undang. Komunikasi politik yang terjalin antara DPD RI dan konstituen di daerah akhirnya berbatas tentang kekuatan emosional atau pribadi tetapi tidak secara legitimasi di parlemen sebagai legislator.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Komunikasi politik merupakan syarat utama terjadinya hubungan dan interkasi antara lembaga keterwakilan seperti DPR, DPRD dan DPD. DPD mempunyai kondisi yang berbeda dari DPR/D karena dipilih secara independen. Media partai politik yang mempunyai tugas sebagai agregasi kepentingan ke masyarakat hilang. Hal inilah yang membuat DPD harus lebih keras lagi membangun sistem komunikasi tanpa adanya partai politik. Komunikasi politik DPD yang dibangun tanpa partai politik diharapkan merupakan kekuatan DPD agar jarak semakin samar dengan konstituenya di daerah.

Salah satu yang menggambarkan komunikasi politik yang dijalankan anggota DPD RI salah satunya adalah pada saat penjarangan aspirasi publik dalam forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik merupakan media pertemuan antara DPD dan masyarakat langsung untuk diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komunikasi riil tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Forum konsultasi publik ini dilaksanakan di 5 desa yang merupakan daerah perbatasan. Fokus penelitian ini adalah Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Pelaksanaan forum konsultasi publik dilaksanakan dengan bekerjasama dengan LSM Perhimpunan PENA dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di perbatasan. Erma Suryani Ranik merupakan perwakilan DPD RI yang ada di dalam forum konsultasi publik tersebut. Permasalahan yang didapat dari forum tersebut sebagian besar merupakan permasalahan infrastruktur yaitu jalan dan berbagai fasilitas inti lainnya.

Komunikasi politik yang terjalin antara anggota DPD RI yaitu Erma Suryani Ranik dan masyarakat perbatasan merupakan komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka memang mulai sangat ditinggalkan dikarenakan keterbatasan biaya dan terkadang dinilai tidak efektif. Tetapi seharusnya komunikasi tatap muka dan berdialog dengan masyarakat tidaklah dihilangkan oleh media massa. Komunikasi politik juga merupakan wujud penguatan/optimalisasi fungsi DPD.

Penguatan fungsi DPD serta peran serta dalam menyerap aspirasi masyarakat khususnya masyarakat daerah perbatasan merupakan salah satu bentuknya. Masyarakat perbatasan yang merupakan masyarakat yang masih dimarginalkan di negeri ini. Untuk bahan pokok saja masyarakat perbatasan membeli dari negara tetangga yaitu Malaysia. Hal inilah yang sering disorot media massa sekarang sehingga memang dalam pembangunan perbatasan dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Khususnya disini adalah lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan mampu menyerap aspirasi publik sebagai pelaksanaan fungsi legislasinya

Efektivitas komunikasi politik Erma Suryani Ranik dan masyarakat perbatasan Desa Sebunga sudah berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara dan analisis penilaian terhadap sosok Erma Suryani Ranik sudah positif. Tetapi kelemahan dari komunikasi politik tersebut adalah waktu yang sangat singkat serta tidak adanya kontinuitas yang terjadi. Komunikasi politik tersebut akhirnya hanya seperti formalitas belaka, karena tindak lanjut dari forum tersebut hanya dari media telepon.

Membangun komunikasi politik langsung yang bukanlah perkara mudah, perlu proses dan waktu serta tenaga. Tetapi tingkat efektivitasnya tinggi untuk membangun citra dan legitimasi di masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya daerah perbatasan Kalimantan Barat masih menjunjung adat-istiadat dan tradisional sehingga pendekatan interpersonal masih sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi politik dengan masyarakat perbatasan..

Efektivitas komunikasi politik yang terjalin antara anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan merupakan bentuk pemanfaatan kearifan lokal sebagai modal/capital untuk pembangunan daerah dan masyarakat perbatasan sendiri. Apabila sudah adanya efektivitas dalam komunikasi politik maka akan membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan menjadi lebih besar.

Hal terpenting dari forum konsultasi publik sebagai alat informasi dan komunikasi masyarakat dengan DPD RI. Metode komunikasi dialogis terbukti dapat menumbuhkan empati, dukungan positif dan kesetaraan antara partisipan komunikator di dalam sebuah forum. Forum ini memang memakan biaya yang lebih tinggi daripada dengan saluran media massa tetapi saluran tatap muka tetap memiliki nilai efektivitas komunikasi politik yang baik.

Persamaan persepsi sudah terlihat antara masyarakat desa Sebunga dan Erma Suryani Ranik selaku anggota DPD RI asal Kalimantan Barat. Kejelasan isi pesan sudah bisa terlihat dari pemahaman masyarakat Desa Sebunga dalam menjelaskan wewenang DPD dipusat. Walaupun kekecewaan karena DPD RI tidak bisa berbuat banyak tapi tanggapan positif dari masyarakat Desa Sebunga terhadap Erma Suryani Ranik selaku anggota DPD RI merupakan hal yang baik. Diantara rakyat dan anggota DPD RI asal Kalimantan Barat yang mempunyai mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat daerah. Adanya persamaan persepsi dan dukungan positif antara masyarakat Desa Sebunga terhadap kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat daerah dengan Erma Suryani Ranik, selaku anggota DPD RI asal Kalimantan Barat.

Adanya kreatifitas dalam membangun analisis tentang permasalahan perbatasan. Masyarakat perbatasan sendiri adalah kumpulan orang yang menetap dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun di perbatasan sudah jelas dapat memberikan penjelasan yang sangat faktual. Hal ini karena mereka adalah objek dalam kawasan mereka sendiri kehidupan dan semuanya berhasil dirasakan oleh masyarakat perbatasan itu sendiri. Masyarakat perbatasan yang kebanyakan hanya berpendidikan SD dan SMP sangat berpengaruh terhadap cara penyampaian, tetapi forum konsultasi publik tersebut menghasilkan kesetaraan di antara kedua belah pihak.

C.2. Saran

Forum Konsultasi Publik daerah perbatasan seharusnya menjadi agenda tetap dari DPD RI untuk menjadi sebuah wujud optimalisasi kewenangan yang dimiliki DPD saat ini. Saluran komunikasi tatap muka dan berdialog adalah untuk menegakan demokratisasi di Indonesia.

Forum konsultasi publik bisa menjadi sebagai perpanjangan tangan atau fasilitator antara DPD dan stakeholder di daerah masing-masing. Forum ini juga dapat menjangkang, menampung serta memformulasikan aspirasi menjadi konsep akademik seperti forum konsultasi publik daerah perbatasan. Konsep akademik ini menjadi bahan bagi anggota DPD untuk diperjuangkan atau diartikulasikan menjadi kebijakan di pusat.

Format forum konsultasi publik dengan komunikasi dialogis sehingga dapat terjadi keseimbangan dan kesetaraan antara masyarakat dan anggota DPD RI. Hal ini dimaksudkan agar semua aspirasi masyarakat dapat dengan mudah disampaikan sebagai upaya untuk memperkuat sistem komunikasi demokrasi. Dimana warga negara diberikan kesempatan yang lebih besar dalam menentukan nasib mereka kedepan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo.(2007), Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Ilmu Politik, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ardial.(2010),Komunikasi Politik, Indeks, Jakarta.
- Arifin, Anwar.(2003), Komunikasi Politik (Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik Indonesia, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Hady, Nuruddin (2010), Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi “Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945,Setara Press, Malang
- Haryadi, Agus at all (2006). *Bikameral Bukan Federal*, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta
- Indriati, F Maria (2009), *Pengkajian Hukum Tentang Peran DPD dalam Kegiatan Legislasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Istiani, Pancer Chatarina at all (2012). *Senator di Batas Republik*,Galangpress, Yogyakarta
- Jawaeng, Robert Endi.at all (2006) *Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal*, Institute for Local Development, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu.(2005) *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Rahimullah (2007), *Hubungan Antar Lembaga Negara Versi Amandemen UUD 1945*,PT. Gramedia, Jakarta
- Rahman, A (2007) *Sistem Politik Indonesia*.Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ravianto, J. *Produktivitas dan Manajemen*.1989.LSIP.FE UI
- Subardjo (2012) *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut UUD 1945 dan Penerapan sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Daerah*,Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sulaiman, King Faisal (2013) *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Susanto, Eko Harry (2009) *Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah Tinjauan Terhadap Dinamika Politik dan Pembangunan*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Wibowo, Pramono Anung (2013) *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Jurnal : Kushandayani, Menakar Peran Dewan Perwakilan Daerah DPD RI JURNAL KONSTITUSI PKK-FH UNIVERSITAS DIPOEGORO VOLUME I NOMOR 1 NOVEMBER 20097-19).
- Modul : Modul Pelatihan Bagi Pengelola Rumah Aspirasi DPD RI konsorsium pengembangan rumah aspirasi DPD RI (FORMAPPI-PSPK) November 2007 Jakarta Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen. Fur Die Freiheit Friedrich Naumann STIFTUNG Konstituen Pilar Utama Partai Politik.
- Jurnal : Hasil-hasil pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI (buku I) Sekretariat Jenderal DPD RI 2008 Jakarta
- Sekretariat Jenderal DPD RI, 2012 *Meneguhkan aspirasi daerah membangun negeri: pengabdian komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun Sidang 2011-2012*
- Internet :
<http://www.jurnalparlemen.com/view/7306/dpd-kualitas-demokrasi-kita-masih-jauh-dari-harapan.htm>.

<http://www.Perhimpunanpena.com>.
<http://ermasuryaniranik.com>

